PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS

Hemafitria^{1*}, Fety Novianty¹, Fitriani¹

¹ Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Pontianak, Indonesia

* rizkyema10@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dan ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif, subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. Teknik dalam pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wujud partisipasi politik masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara yang merujuk kepada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah masyarakat secara aktif menggunakan hak suaranya dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan ikut serta dalam kegiatan politik. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah ialah faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyangkut tentang pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menyebarkan pelaksanaan kegiatan pemilu kepada masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, dan Pilkada

ABSTRACT

Community political participation is closely related to a country's democracy. In a democratic country, supreme sovereignty rests with the people, whose exercise is carried out through joint activities to determine goals, as well as the future and to determine who will take the lead. Political participation is the voluntary activity of the community in electing leaders either directly or indirectly and actively participating in political life. The method used in this research is qualitative with descriptive form, the subjects in this study are the village head, community leaders, and youth leaders. The techniques in collecting this data are observation, interviews, documentation. The results of this study can be concluded that the form of public political participation can be used as a measure to assess the stability of the political system, citizen satisfaction and dissatisfaction, which refers to the high and low level of public political participation in the general election of regional heads, the community actively uses their voting rights in carrying out general elections. regions and participate in political activities. Factors that influence public political participation in regional head elections are the factor of public awareness and trust in the government concerning public knowledge about politics. Efforts to participate in public politics in the general elections for regional heads in conducting socialization activities, the village government has been very maximal in disseminating the implementation of election activities to the community.

Keywords: Political Participation, General election , District Heads Election

PENDAHULUAN

Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut (Rosana, 2016). Jadi, negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan. Maka suatu kegiatan yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan ikut serta menjadi anggota partai.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai

kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi (Sarbani, 2015). Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan (Triwijaya et al., 2020). Secara umum pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat didalam berbagai proses politik, karena pada prinsipnya dinilai sebagai bentuk pengembalian atas hak masyarakat di daerah secara utuh dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan pimpinan sebagai kepala daerah Pemilihan umum diikuti oleh Partai-partai politik yang mewakili kepentingan spesifik warganegara, kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Oleh karena itu sistem pelaksanaan pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar mewakili di dalam sebuah proses pembuatan kebijakan negara di parlemen. (Miriam, 2015).

Sistem pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Mengingat esensi utama yang terkandung didalam sistem pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya sebatas pada legimitasi untuk menentukan pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara dalam momen-momen elektoral, melainkan dengan mengintervensi proses pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka agar membuka kesadaran tentang demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai partisipasi, bukan hanya menjadi penonton atas permainan politik. Partisipasi politik ialah aspek penting dalam tatanan suatu negara demokrasi, sekaligus sebagai sebuah ciri khas adanya suatu modernisasi politik (Dewantara et al., 2019). Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politik itu lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi suatu kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik ialah wujud dari kedaulatan rakyat yaitu suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi, apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratis di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Karena dari adanya kesadaran masyarakat akan menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik. Terutama sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Bila merujuk pada uraian tersebut, bahwa kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya merupakan suatu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, ukuran partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya kadar demokrasi yang berkembang di negara tersebut. Jika pelaksanaan pemilu terjadi penyimpangan dan berbagai kecurangan dilakukan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak maka pemilu yang dilakukan secara serentak di belahan dunia dengan biaya yang tak sedikit ini tidak akan mencapai hasil optimal sesuai dengan harapan rakyat Indonesia secara mayoritas. Mengakibatkan, pemerintahan demokratis hanya sebagai angan yang tak terwujud bahkan kekacauan terjadi dimana-mana.

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, serta dapat dipertanggung jawabkan, maka sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat ikut serta menentukan, mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi itu sendiri. Dan masyarakat lebih dapat ikut berpartisipasi didalam pemilihan kepala daerah, dan membangun kesadaran dalam berpolitik,serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala

daerah yang ingin membangun daerahnya untuk lebih maju dan sejahtera. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung didalam undang-undang sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang- undang tersebut akan membuat masyarakat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Muhaling, 2014).

Tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berjalan relatif lancar dan aman, sebagai bentuk dari perkembangan kehidupan demokrasi yang kian modern, sementara disisi lain tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat partisipasi dalam kehidupan politik sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa lima tahun kedepan. Dapat kita lihat bahwa dalam partisipasi politik masyarakat yang masih Rendahnya Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan pada pemilihan umum dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap politik membuat masyarakat tidak peduli dan cenderung apatis dengan politik dan menganggap bahwa politik hanya sebatas proses memilih pemimpin dan pemilu itu tidaklah penting. Maka dibutuhkan suatu tindakan dengan berbagai cara dan strategis yang tepat agar lebih baik kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara menumbuhkan kesadaran politik melalui sosialisasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Sumantri, 2018) Sosialisasi politik merupakan suatu proses ataupun cara memberitahukan suatu sistem politik kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menanggapi serta bersikap perihal dalam peristiwa politik.” Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik ialah suatu proses untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan menentukan sikapnya terhadap gejala-gejala politik yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas, Penelitian yang dilakukan ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas. Penetapan partisipan penelitian dalam penelitian ini dari kalangan tokoh dan warga masyarakat. Melalui tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintah, petugas Pemilu diperoleh diskripsi secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2014). Sedangkan metode deskriptif menurut (Hadari, 2012) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik observasi langsung dan komunikasi langsung berupa wawancara, tidak langsung dan Teknik dokumentasi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam kehidupan dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya, walaupun sering terjadi benturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah untuk menentukan hak suara dalam memilih pemimpin yang bijaksana, tegas, lugas dan bertanggung jawab, jujur serta dapat mengemban dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Menurut Ramlan Surbakti dalam (Cholisin & Nasiwan, 2012) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat dalam memilih pemimpin baik langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan umum. Sedangkan Menurut (Liando & M, 2014) menyatakan bahwa Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu memang menjadi indikator legitimasi pemerintahan yang terbentuk, tidak jarang

pemerintah berusaha mendorong masyarakatnya untuk memberikan suaranya ketika Pemilu berlangsung (Sucipto, 2014).

Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika kesadaran politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat, karena apabila seseorang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara maka akan mendorong orang tersebut untuk berpartisipasi politik. Dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam menjalankan dan mengajak masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut serta dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan dan harapan untuk kedepan agar menjadi lebih baik.

Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Secara umum wujud partisipasi politik masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan pemilihan umum di desa Perapakan kecamatan pemangkat berlangsung sangat baik. Kondisi ini diwujudkan melalui partisipasi politik masyarakat yang ikut dalam memberikan suara, melakukan kegiatan kampanye, ikut dalam diskusi politik dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dalam suatu negara demokrasi dimana masyarakat dilibatkan langsung untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa sumber yang menyatakan secara umum bahwa wujud partisipasi politik masyarakat di desa Perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas terwujud dari antusias masyarakat pergi ke TPS untuk memberikan suara dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan politik seperti diskusi politik atau bertukar pikiran membicarakan tentang kegiatan pemilihan umum yang berlangsung didesa perapakan. masyarakat juga ikut serta dalam kegiatan kampanye meski ditengah covid 19 walaupun hanya Sebagian saja yang ikut serta. Selanjutnya

masyarakat juga membentuk dan bergabung dalam sebuah kelompok atau menjadi tim sukses dan masyarakat menyatu dan berkoalisi membuat tim sukses untuk mendukung pasangan calon pemimpin daerah yang akan mereka dukung dan mencari suara terbanyak supaya calon yang akan mereka beri dukungan menang dalam pemilihan umum kepala daerah. Hal ini didukung dari hasil perhitungan surat suara pemilihan umum kepala daerah dari TPS 001 sampai TPS 011 di Desa Perapakan Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data hasil perhitungan surat suara pemilihan kepala daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas dapat dilihat bahwa 71,33% penduduk di Desa Perapakan Kabupaten Sambas ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah dengan masyarakat Desa Perapakan Kabupaten sambas yang tergolong dalam DPT sebanyak 3286 atau sebesar 72,69% dari 4520 masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Perapakan Kabupaten Sambas yang tidak memilih (golput) dalam pemilihan kepala daerah sebanyak 942 masyarakat desa.

Berdasarkan temuan diatas dapat dilihat bahwa wujud partisipasi politik masyarakat secara aktif dalam melakukan kegiatan politik pada saat pemilihan umum kepala daerah dimana masyarakat memilih langsung pada saat proses pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin kepala daerah. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif dalam kegiatan politik atau kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. (Arifin, 2015). Selain itu menurut (Liando & M, 2014) menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik.

Warganegara ikut berperan penting dalam menseleksi calon pemimpin kepala daerah yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun Tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Arniti, 2020). Adapun wujud partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didesa Perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas adalah sebagai berikut.

1. Pemberian suara

Dalam wujud partisipasi politik masyarakat yang ada didesa perapakan dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan didesa perapakan, dengan tujuan memilih seseorang yang akan ditunjuk melalui pemungutan suara secara musyawarah atau

kegiatan pencoblosan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut serta dalam memberikan partisipasi politiknya melalui pemberian suara secara langsung.

2. Diskusi Politik

Pada beberapa kegiatan masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di desa perapakan kecamatan pemangkat kabupaten sambas dimana suatu interaksi yang dilakukan melalui komunikasi langsung atau bertukar pikiran dan membahas tentang kegiatan politik yang akan dilaksanakan pada kegiatan pemilihan umum kepala daerah dimana masyarakat ikut dalam kegiatan rapat dan ikut serta dalam melakukan diskusi politik.

3. Kegiatan kampanye

Serangkaian usaha yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah khalayak ramai yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat melakukan kegiatan kampanye meski dalam jumlah sedikit tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan kampanye dan mencari dukungan dari masyarakat lain dengan tujuan untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang akan ditunjuk sebagai calon pemimpin. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat melakukan kegiatan kampanye meski dalam keadaan covid 19 dan sedang menjalani protokol kesehatan tidak mengurangi antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan kampanye.

4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Kepentingan yang sama diantara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat sebuah lembaga atau bergabung dalam organisasi politik atau himpunan orang-orang yang sistematis atau menjadi tim sukses pada saat pemilihan umum bertujuan untuk mencari dukungan kepada masyarakat lain untuk dapat mendukung calon kepala daerah yang akan mereka dukung dan menang dalam pemilihan umum.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah faktor pekerjaan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan yang cukup mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dan juga faktor Pendidikan masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin kepala

daerah yang sebelumnya tidak begitu banyak perubahan yang dilakukan membuat masyarakat kurang kesadaran dalam memilih calon pemimpin kepala daerah namun masyarakat tetap antusias dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum meski sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam pemilihan umum.

Faktor Pendidikan yang membuat masyarakat tidak mengerti atau kurangnya pemahaman ilmu politik membuat masyarakat tidak memahami bahwa pentingnya pemilihan umum dan juga pekerjaan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan membuat masyarakat tidak dapat ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan juga kebingungan masyarakat dalam visi misi yang tidak sesuai dengan harapan membuat masyarakat kurang kesadaran untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Selanjutnya calon pemimpin daerah memberikan bantuan berupa sembako untuk menarik perhatian masyarakat sembari menyuarakan aspirasi yang akan calon pemimpin daerah sampaikan kepada masyarakat melalui visi misinya untuk kemajuan daerah kedepannya, keadaan politik pada saat proses pemilihan umum kepala daerah berlangsung dengan tertib dan aman melihat antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Pentingnya membangun suatu kredibilitas dan integritas politik calon pemimpin dimana hal tersebutlah yang berpotensi untuk menjamin tingkat partisipasi politik yang memuaskan, selain pencitraan di butuhkan jiwa kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan kepentingan golongan (Valiana & Trisiana, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa calon pemimpin daerah salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin kepala daerah baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertarik dengan visi misi yang ditawarkan sampai adanya ketidakyakinan masyarakat apakah Ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan. (Liando & M, 2014). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kebingungan dalam visi misi yang disampaikan calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang akan mereka pilih nantinya dan juga masyarakat tidak memahami arti pentingnya pemilihan umum kepala daerah. Keadaan politik pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah berlangsung aman dan tertib.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat yaitu kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah (Viva, 2019). Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Azhar, 2019) yaitu:

1. Peransang Politik

Dimana pemerintah desa Perapakan memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah. Dimana pemerintah desa memberikan peransang politik kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik, ikut dalam diskusi politik melalui diskusi secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Karakter Pribadi

Karakter kepedulian seseorang untuk ikut secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum ikut dalam kegiatan politik, atau suatu kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk dapat ikut dalam berpartisipasi pada saat pemilihan umum kepala daerah juga menjadi penentu seseorang untuk berpartisipasi

3. Karakter sosial

Suatu lingkungan seseorang, baik menyangkut sosial dimana masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau bergabung dalam suatu kelompok organisasi politik untuk dapat ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan politik .

4. Keadaan Politik

Situasi atau lingkungan politik dan keadaan lingkungan sosial sekitar seorang pemilih yang baik dan kondusif agar pemilih senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Upaya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan

Kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional, dimana jika partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi, seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Namun Sebaliknya, jika partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik maka akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan (Fatwa & Nur, 2016). Suatu kepedulian masyarakat dalam mendukung jalannya suatu sistem politik disuatu daerah, saat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, maka dibutuhkan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Azhar, 2019). Upaya Partisipasi politik masyarakat yang ada di desa perapakan kecamatan

pemangkat dimana suatu bentuk kepedulian masyarakat dalam melakukan dan ikut serta didalam kegiatan politik atau melakukan pemilihan umum oleh sebab itu peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam berpartisipasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda bahwa upaya partisipasi politik yang dilakukan pada saat pemilihan umum menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemilihan umum kepala daerah ialah masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi kepala daerah, membentuk relawan demokrasi, memberikan Pendidikan kepada pemilih pemula, dan peran media massa. Wujud partisipasi politik ini menghadirkan demokrasi yang memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat (Kusmanto, 2014). Adapun upaya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah didesa Perapakan yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi pemilihan kepala daerah

yang diperlukan untuk memaksimalkan proses sosialisasi pemilihan kepala daerah tentang pentingnya pemilihan umum dalam sebuah negara yang negara demokratis. Dimana pemerintah desa melakukan sosialisasi sejak awal sebelum pelaksanaan pemilihan umum berlangsung untuk memaksimalkan proses sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

2. Membentuk relawan demokrasi

Gerakan sosial yang dimaksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi. Dimana pemerintah desa membentuk relawan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

3. Memberikan Pendidikan bagi pemilih pemula

Dalam upaya melakukan Pendidikan bagi pemilih pemula tidak hanya dilakukan ketika usia pilih. Namun lebih dari itu, Pendidikan bagi pemula dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun, walaupun hanya dilakukan secara umum tetapi diharapkan pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah.

4. Peran media massa

Salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses pilkada. Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja penyelenggara pemilu, namun juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu peran media massa dalam menyebarkan pamphlet, brosur-brosur atau menyebarkan informasi melalui media sosial untuk memaksimalkan proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa agar masyarakat dapat ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan sosialisasi pemilihan umum kepala daerah sudah cukup maksimal sejak awal dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum kepala daerah supaya masyarakat dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah, dan membentuk relawan untuk dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu selain itu pemilih pemula diberikan Pendidikan secara umum agar pemilih pemula dapat ikut serta dan dapat berpartisipasi dalam pemilu, peran media massa juga sangat penting dalam proses pemilihan umum dimana pemerintah desa memberikan brosur,serta menyebarkannya di media sosial agar masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemilu.

KESIMPULAN

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah memiliki kesadaran dalam berpartisipasi politik dan dapat diwujudkan dengan ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik walaupun ada masyarakat sebagian yang tidak ikut aktif dalam memberikan partisipasi politiknya. Wujud partisipasi politik masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik kepuasan dan ketidakpuasan warga negara yang merujuk kepada tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah masyarakat secara aktif menggunakan hak suaranya dengan persentase perhitungan 71,33% masyarakat desa terlibat dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan ikut serta dalam kegiatan politik, selain itu juga masyarakat

juga ikut dalam kegiatan kampanye dan ikut dalam kegiatan diskusi politik atau bertukar pikiran, selain itu masyarakat juga menjadi tim sukses dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah ialah faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyangkut tentang pengetahuan masyarakat tentang politik. Upaya partisipasi politik masyarakat di desa Perapakan dalam pemilihan umum kepala daerah dalam melakukan kegiatan sosialisasi, pemerintah desa sudah sangat maksimal dalam menyebarkan pelaksanaan kegiatan pemilu kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*. Bilbiografi.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol 4 No 2.
- Azhar, S. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau. *Journal of Government and Political Studies*, Vol 2 No 2.
- Cholisin, M. S., & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar Ilmu*. Penerbit Ombak.
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405.
- Fatwa, & Nur, A. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 4. No.
- Hadari, N. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, vol 2 no 1.
- Liando, & M, D. (2014). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol 3 No.2, 22.

- Miriam, B. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaling, A. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro*. Vol 3 No 2.
- Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIs*, Vol.12 No.
- Sarbani. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII Nomor.
- Sucipto. (2014). Budaya Politik Lokal dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial , MAHAKAM*, Volume 4, 31–44.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *METODE PENELITIAN ILMIAH* (pp. 348–362).
- Sumantri, D. (2018). Sosialisasi Politik Pasangan Calon Kepala Daerah Oleh Kpu Kabupaten Bekasi Pada Pilkada Tahun 201. *Cendikiawan*, 1226.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115.
<https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Viva, J. (2019). *Undang- undang Pemilu 2019*. Genesis Learning.